

PENGARUH PENGENDALIAN SISTEM ITERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INTEGRITAS TERHADAP FRAUD KEUANGAN DESA SEKECAMATAN SURALAGA

Asrin¹ Ahmad Murad²
Universitas gunung rinjani
email: asrinugr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas terhadap kecurangan keuangan (*fraud*) pada Desa-Desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan keuangan (*fraud*). Sedangkan variabel independennya adalah pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas.

Populasi dalam penelitin ini mencakup perangkat desa di 15 Desa Se_Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan angket kuesioner yang disebar diseluruh perangkat desa yang ada di 15 Desa di Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim, penyebaran kuesioner berjumlah 60 kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pengendalian internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan integritas, kecurangan (Fraud)

PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Otonomi Daerah sesuai amanatnya adalah Pemerintah Daerah dinyatakan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada tahun 2001 di mana sejak di berlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pemerintah daerah, dalam hal tersebut pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Undang-undang No 32 Tahun 2004 bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah administrasi Nusa Tenggara Barat dan terletak di pesisir timur Pulau Lombok yang memiliki wilayah administrasi yaitu 21 Kecamatan dengan 239 desa (Badan Pusat Statistik Lombok Timur). Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah Tingkat II. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa. (<http://www.Negalsaritangerang.blogspot.co.id>.2012). Kecamatan berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat dalam rangkaian untuk menambah koordinasi penyelenggaraan bantuan publik, pemberdayaan dan masyarakat Desa/kelurahan pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang sebagai mengatur dan untuk mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat tempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan lembaga suatu perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan tersebut demi menjadikan pembangunan pemerintah. Dalam penjelasan Sujarweni, 2015 : 3 tentang Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Didalam menyusun laporan keuangan ada beberapa komponen laporan keuangan yang harus di sampaikan meliputi laporan neraca, realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik Sujarweni (2015 : 125-134) menjelaskan bahwa laporan keuangan desa adalah: 1. Neraca Desa, 2. APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), 3. laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa. Dalam penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang harus wajib di laporkan oleh pemerintah desa berupa: 1. Buku Kas, 2. Anggaran, 3. Buku Bank, 4. Buku Pajak, 5. LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

SAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan “bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas laporan”. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang di percayakan kepadanya.

Kecurangan (*fraud*) dalam bidang akuntansi banyak menyita perhatian publik. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia sudah terlampau sering terjadi. Berita mengenai hal itu telah tersebar diberbagai media massa sehingga kecurangan akuntansi sudah bukan rahasia lagi. Kasus fraud yang sering terjadi dimulai dari kecurangan akuntansi yang mengarah pada tindak korupsi. Tindakan yang sering terjadi dan mengarah pada korupsi yaitu manipulasi penghilangan dokumen, pencatatan, *mark-up* yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara (Dewi dan Ratnadi, 2017). Cara mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), organisasi harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Selain itu, berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) (Sukadwilinda dan Ratnasari, 2013).

Pengendalian internal adalah suatu cara yang di rancang untuk tercapainya tujuan dalam memberikan jaminan yang berkaitan dengan ketaatan pada hukum yang berlaku, efisiensi operasi dan efektifitas, dan reliabilitas pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Rahmani (2011) “menjelaskan sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehebatan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

SPI yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan di sebut dengan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP). Karna, SPIP tersebut wajib dilakukan oleh seorang menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Sedangkan di tingkat pemerintahan desa SPIP di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di bentuk tidak hanya sebagai mitra kerja kepala desa dan tidak hanya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan tetapi BPD juga di bentuk untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Aparat Desa.

Upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan maka di perlukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Pengendalian di laksanakan dengan berpatutan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana pengendalian intern adalah sebagai arahan penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta di lakukan secara komprehensif. (Romney, *et al.* 2014 dalam Santoso, 2016) “salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai, salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidak jujuran pegawai”.

Penelitian yang di lakukan oleh Santoso (2016) “yang menyimpulkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan daerah”. Berbeda dengan Widiyatama, dkk (2017) “menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Meski di lakukan di tingkat pemerintahan yang berbeda dengan hasil penelitian ini sudah jelas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sangat mendukung akuntabilitas keuangan suatu organisasi, baik pada organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan, dalam upaya mengantisipasi adanya *fraud* (penggelapan). Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Penelitian Herawati dan Darmawan (2014) “menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin efektif pengendalian internal suatu perusahaan, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi”. Semakin baik pengendalian internal akan menjadikan menurunnya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari, Yuniarta dan Adiputra (2015) “menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”.

Di Era globalisasi pada saat ini Pemanfaatan teknologi informasi tidak kalah pentingnya bagi organisasi, baik pemerintahan maupun swasta dalam rangka mendukung kegiatannya dalam operasional organisasi itu sendiri untuk menunjang bagi perbaikan masyarakat. Salah satu sumber daya yang dapat di manfaatkan oleh desa adalah teknologi informasi untuk mendukung pengendalian intern dalam menghasilkan akuntabilitas keuangannya. Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan

setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan informasi yang sampaikan. Teknologi informasi terdiri dari (*mainframe, mini, micro*) *database*, perangkat lunak (*software*), (*internet, intranet*), *elektronik*, jaringan, *comerce* dan bentuk yang lain mempunyai hubungan terhadap teknologi, (Wilkinson *et, al.* 2000 *dalam* Nurillah, 2014). Teknologi informasi sangat pesat berkembang dan dampaknya telah kita nikmati, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi melalui telpon saluler dan internet. Teknologi informasi adalah teknologi yang bergabung dengan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahyuni, 2:2013).

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang di gunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, mendapatkan, menyimpan dan memanipulasi data. Teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nurillah (2014) “meyimpulkan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa sudah jelas bahwa di Era milenial seperti yang sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung kegiatan seseorang/badan atau suatu oraganisasi, tidak terkecuali dalam mengelola keuangannya baik swasta maupun pemerintahan. Hal ini juga di ungkapkan dalam penelitian yang di lakukan oleh Santoso (2016) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Akan tetapi Pengelolaan keuangan Desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukung dan sarana-prasarana, namun yang paling penting juga harus di miliki desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Penulis menyadari bahwa Aparat Desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Badriyah (2015 : 13) “Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktifitas. Faktor-faktor secara makro masukan seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat tanpa di dukung oleh ketersediaan faktor SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas”. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa di gantikan oleh sumber daya lainnya. Betapun modern toknologi yang di gunakan, atau seberapa banyak dana yang di siapkan tanpa sumber daya manusia yang profesional, semuanya tidak bermakna (Tjutju, 2008 *dalam* Badriyah, 2015:15).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang memandang fenomena/gejala itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur, dan hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2017:8). Menurut Sugiyono (2017 : 80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peniliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subyek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu. Kemudian di tarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Desa dan Aparat Desa di Kecamatan Suralaga. Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 90 orang seperti yang tergambar pada Tabel 3.1 dibawah berikut ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi (Sugiyono, 2017 : 81). Pengambilan sampel atas responden di lakukan secara *porposive sampling*. *Porposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2017 : 85). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat di lakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2017:137).

Tekhnik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda adalah analisis yang mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Ghozali (2012:95) menyatakan “regresi linier berganda adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang di ketahui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suralaga adalah salah satu kecamatan Suralaga yang terletak di sebelah utara Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki kode pos 83652. Batas-batas yang ada di Kecamatan Suralaga adalah di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Aikmel, di sebelah barat berbatasan langsung dengan kecamatan Pringgasele, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Selong dan Labuhan haji, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Labuhan Haji. Luas wilayah yang ada di Kecamatan Suralaga adalah seluas 27,02 km² dan terdiri dari 15 desa. Tinggi Kecamatan Suralaga dari permukaan air laut berkisar 113-263 meter.

Uji statistik t di lakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indeviden secara individual dalam menerangkan variasi variabel devenden Ghozali (2012:98). Pengmbilan keputusan pada uji statistik t dapat di lakukan dengan melihat nilai signifikannya pada taraf kepercayaan 0,05. Jika nilai signifikannya $\geq 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,365	11,829		3,412	,001
	X1	-,286	,364	-,130	-,786	,436
	X2	,074	,374	,028	,198	,844
	X3	-,649	,341	-,321	-1,900	,063
	X4	-,114	,143	-,111	-,798	,429
a. Dependent Variable: Y						

Pengujian H_a di ajukan dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan uji t. Uji t di maksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t di atas menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dapat di peroleh dengan cara ($df=n-k-1$), maka di peroleh ($df=53-4-1=48$) maka di dapat t tabel adalah 2,01063.

Berdasar komputasi data dengan bantuan SPSS di peroleh: Diduga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Signifikan negatif Terhadap Fraud Keuangan Desa. Berdasar hasil perhitungan statistik yang mana nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $-0,786 < 2,01063$, dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 ($0,436 > 0,05$) maka dapat di simpulkan bahwa H_1 ditolak artinya sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud keuangan desa.

Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap fraud keuangan desa. Berdasar hasil perhitungan statistik yang di bantu dengan SPSS di mana nilai t hitung untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,198 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,01063 ($0,198 < 2,01063$) dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,844 > 0,05$) dengan demikian dapat di simpulkan bahwa H_2 di tolak artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa.

sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud keuangan desa. Berdasar hasil perhitungan statistik yang di bantu dengan SPSS di mana nilai t hitung untuk variabel sumber daya manusia yaitu $-1,900$ lebih besar dari t tabel yaitu 2,01063 ($-1,900 < 2,01063$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,063 > 0,05$) dengan demikian dapat di simpulkan bahwa H_3 ditolak artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa.

Integritas berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud keuangan desa. Berdasar hasil perhitungan statistik yang di bantu dengan SPSS di mana nilai t hitung untuk variabel sumber daya manusia yaitu $-0,798$ lebih besar dari t tabel yaitu 2,01063 ($-0,798 > 2,01063$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,429 < 0,05$) dengan demikian dapat di simpulkan bahwa H_3 ditolak artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa.

Uji f di gunakan untuk menguji hipotesis ke empat yaitu menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut akan di sajikan Tabel yang menunjukkan hasil dari uji F.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194,047	4	48,512	2,585	,049 ^b
	Residual	900,934	48	18,769		
	Total	1094,981	52			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3						

Berdasarkan tabel di 2 dapat digunakan untuk menguji hipotesis ke lima yang berbunyi sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber

daya manusia dan integritas berpengaruh secara simultan positif signifikan terhadap fraud keuangan desa.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat di gunakan menguji H5 secara simultan, pertama dengan melihat nilai signifiakansinya sebesar $0,049 < 0,05$ dan di uji dengan tabel F dengan cara (k ; n-k) maka di peroleh (4 ; $53-4= 49$) maka di dapat F tabel adalah 2,56 di bandingkan dengan F hitung yaitu 2,585 ($2,585 > 2,56$), maka dapat di simpulkan bahwa H5 diterima dan H0 ditolak. Menerima H5 menyatakan bahwa sistem pengendalian intrn, pemanfatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan integritas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap fraud keuangan desa.

Tabel 3
Hasil Determinansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,421 ^a	,177	,109	4,332
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3				

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat di ketahui nilai R Squar 0,109 maka dapat di simpulkan kontribusi pengaruh masing-masing variabel Independen yaitu sistem pengendalian intern, pemanfatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan integritas terhadap variabel dependen yaitu fraud keuangan desa adalah 0,109.

Berdasarkan hasil pengujian statistik di peroleh hasil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,436 > 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel ($0,786 < 2,01063$) yang artinya Ha ditolak dan Ho di terima. Atau bisa di katakan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa.

Pemanfaatan Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa. Koefisien variabel pemanfatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat singnifikansi $0,844 > 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel ($0,198 < 2,01063$). Maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis kedua tidak dapat di terima.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap fraud keuangan desa. Koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat singnifikansi $0,063 > 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($1,900 < 2,01063$) maka dapat di simpulkan bahwa H3 dapat ditolak. Ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang tinggi sangat di butuhkan dalam penegelolaan keuangan desa.

Integritas berpengaruh terhadap fraud keuangan desa. Koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat singnifikansi $0,429 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($0,798 > 2,01063$) maka dapat di simpulkan bahwa H4 dapat ditolak. Ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang tinggi sangat di butuhkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Untari (2015) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah, Santoso (2016) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, begitu juga dengan Mada, Dkk (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud keuangan desa. Hipotesis ke lima juga dapat diterima karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 ($0,429 > 0,05$) dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yaitu $2,585 < 2,77$, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu H_a diterima dan H_0 ditolak. Apabila ketiga variabel ini diterapkan secara ber sama-sama akan meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di pemerintah-pemerintah desa yang ada di kecamatan aikmel dan kecamatan lenek, dan di seluruh kabupaten lombok timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,436 > 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel ($-0,786 < 2,01063$) yang artinya H_a ditolak dan H_0 di terima.

Koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,844 > 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel ($0,198 < 2,01063$) yang artinya H_0 di terima H_a di tolak.

Koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,063 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($-1,900 > 2,01063$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien integritas berpengaruh positif signifikan terhadap fraud keuangan desa berdasarkan hasil analisis uji statistik menggambarkan tingkat signifikansi $0,429 > 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel ($-0,798 < 2,01063$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hipotesis ke lima juga dapat diterima dengan tingkat signifikannya yaitu $0,049 < 0,05$ dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yaitu $2,585 > 2,56$, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu H_a diterima H_0 ditolak, artinya sistem pengendalian intrn, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan integritas berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap fraud keuangan desa.

REFRENSI

- Badriyah, Mila. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia cetakan 1. Bandung : Pustaka Setia.
- Dewi, K.Y., Ratnadi, N.M. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecenderungan kecurangan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12, No.2.
- Hanim, H.N., Mustafa. B., Said, M.J. (2017). Mitigating asset misappropriation through integrity and fraud risk elements: Evidence emerging economies. Journal of Financial Crime, Vol.24, Iss 2.

- Lestari, N. K.L., Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh pengendalian, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21, No.1.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Skripsi. Semarang: Universitas Diponego.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Desa
- Rahmani, Nani. 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di Sajikan Dalam Widyaswara Balai Diklat Keuangan. Medan, 28 oktober.
- Schlenker, B.R. (2008). Integrity and character: Implications of principled and expedient ethical ideologies. *Journal of Social and Clinical Psychology*, Vol.27, No.10, pp. 1078-1125.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suharmi Arikunto (2006:149) tentang bentuk-bentuk instrument penelitian
- Undang-undang No 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No 32 Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3. Tentang Alokasi Dana Desa